

FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) SUMBER KEKUATAN POLITIK IDENTITAS PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017

Oleh :

Jeni Minan

Feri Fadi Rizki

(Dosen STISIP Banten Raya)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang politik identitas yang digerakan oleh Front Pembela Islam dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, yang menjelma sebagai kekuatan penumbang calon petahana Basuki Cahaya Purna dan Djarot saeful Hidayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga pendekatan: fenomenologis, dinamis dan intraktif, sebagai upaya untuk memperoleh tujuan penelitian dengan benar. Hasil yang didapati dalam penelitian menunjukkan bahwa politik identitas yang digerakan oleh FPI diawali oleh ketidakcocokan prinsip antara FPI dengan Basuki Cahya Purnama yang merupakan Gubernur DKI Jakarta yang berbeda keyakinan dengan FPI. Selanjutnya politik identitas itu menguat setelah blunder politik dilakukan oleh calon gubernur petahana terkait dengan surat almaidah ayat 51 dan yang terakhir kehadiran para tokoh Islam dari berbagai kalangan menambahkuatkan ukhuah islamiah warga Jakarta khususnya, yang sebelumnya sudah sering disinggung dengan kebijakan-kebijakan yang kurang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan mereka sebagai umat Islam.

Kata kunci: FPI Penggerak Politik Identitas

A. Pendahuluan

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Jakarta, namun seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini, bukan disebabkan Jakarta sebagai Ibukota Indonesia atau sebagaimana yang banyak disebutkan oleh para pakar “Jakarta cerminan politik Indonesia”. Namun hajatan politik Jakarta yang panas menghadirkan tokoh-tokoh yang dinamis dan kontroversi baik dari kalangan tokoh politik maupun tokoh agama. Kondisi itulah yang memancing masyarakat untuk ikut memberikan perhatiannya ke Jakarta. Sehingga Pilkada daerah lain yang dilaksanakan serentak dengan Jakarta, hampir luput dari perhatian karena gaungnya terserap oleh gaung Pilkada Jakarta.

Tensi panas Pilkada DKI Jakarta, sudah dapat diprediksi dan sebetulnya sudah terlihat jauh sebelum Pilkada itu diselenggarakan, yaitu ketika Joko Widodo yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta Priode 2012-2017 mencalonkan diri dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Kekhawatiran itu muncul dari ormas Islam FPI yang berdemonstrasi tidak setuju atas Basuki Cahya Purnama (Ahok) Wakil Gubernur dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014 menggantikan posisi Joko Widodo.

Sikap politik FPI ini, memanggil sebagian elemen masyarakat baik di pemerintahan, partai politik pendukung dan organisasi-organisasi, untuk melakukan pembelaan terhadap posisi Basuki Cahya Purnama sebagai Gubernur. FPI dituduh sebagai ormas intoleran. Perdebatan tanpa solusi inilah, yang kemudian membuat kondisi politik di Jakarta menjadi tidak kondusif. Pernyataan-pernyataan politik secara langsung dan berita-berita yang termuat di surat kabar dan media elektronik semakin memperkeruh kondisi politik di Jakarta.

Fenomena politik diatas menarik para ilmuwan, pengamat dan fungsionaris partai memberikan penilaian terhadap konstalasi politik yang terjadi pada saat itu. Umumnya mereka berpendapat bahwa Pilkada DKI Jakarta melahirkan kemenangan penggunaan politik identitas. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Donald L Morowitz (1998), politik identitas adalah politik yang memberikan batasan tegas untuk menentukan siapa yang harus dipilih dan siapa yang harus ditolak, penentuan garisnya tidak dapat dirubah, dan anggota bukan anggota bersifat tetap. Artinya, dalam politik identitas, perbedaan menjadi karekteristik politik yang paling penting.

Uraian diatas, menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana politik identitas menjelma menjadi gerbong kekuatan politik yang digerakkan oleh FPI pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan untuk mengetahui proses dan dinamika politik identitas yang digerakan oleh FPI, penulis memakai dua macam data, yaitu data skunder dan data primer. Penguatan kualitatif dalam kajian ini, yaitu dengan penggunaan metode pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi sebagai data utama.

Untuk memperoleh tujuan penelitian yang jelas dan menyeluruh penelitian ini menggunakan tiga pendekatan antaranya adalah: Pertama, pendekatan *fenomenologis*, memahami peristiwa dalam hubungannya dengan orang atau kelompok dalam situasi tertentu. Artinya obyek penelitian tidak hanya didekati pada masalah yang empirik saja, tapi juga mencakup fenomena yang tidak lain dari persepsi pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek mengenai suatu diluar subyek. Kedua, pendekatan dinamis, berupaya menempatkan keadaan yang sesuai dalam sesebuah kontek diakronik, yang bertujuan melihat keterkaitan dan perubahan dalam gerak perkembangan penggunaan politik identitas, terutama dalam masalah performa sosial, identitas-identitas, ideologi-ideologi, dan hal tujuan politiknya. *Ketiga*, pendekatan intraktif, usaha untuk melukiskan gerak perkembangan adaptasi politik identitas sebagai akibat dari pertemuan dinamis antara masa lalu dan masa kini. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan terarah, maka penulis menganalisis data tersebut secara *qualitative descriptive*.

C. Politik Identitas

Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan, yaitu, konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Meskipun melahirkan ancaman baru (Agnes Heller dan Sonja Puntsher Riekmann, 1996). Fokus utama kajian dan permasalahan politik identitas adalah menyangkut

perbedaan- perbedaan yang didasarkan atas asumsi- asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. (Abdillah, 2002). Artinya dalam politik identitas pengangkatan perbedaan sebagai ciri politik berimplikasi pada munculnya resiko baru sebagai konsekwensi politik.

Perbedaan yang dimaksud diatas tentunya tidak muncul tanpa sebab, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, bahwa isu politik identitas muncul ketika jender, feminisme, ras, etnisitas dan kelompok-kelompok sosial lainnya menghadapi masalah minoritas dan merasa terpinggirkan serta merasa teraniaya yang pada akhirnya mereka mennyuarakan kepengtingan bersama dalam kelompok-kelompok identitasnya masing-masing. Selanjutnya cakupan politik identitas meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam. (Ahmad Syafii Maarif, 2012)

Dalam konsep lain politik identitas dimaknai sebagai sebuah orientasi menuju teorisasi sosial atau politik, bahkan lebih daripada sekumpulan kesamaan ide-ide saja. Politik identitas berusaha menantang dan membuang penindasan dengan membentuk ulang identitas kelompok melalui sesuatu yang terlihat dalam proses pengenalan diri politik-kultural. Marjinalisasi kelompok melalui pelabelan-pelabelan dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dominan yang terstrukturkan, dapat dilawan oleh pembentukan ulang identitas untuk memberikan kelompok rasa bangga dan penghargaan diri. Dengan demikian, memeluk dan memproklamasikan sebuah identitas sosial yang positif merupakan sebuah tindakan pembelaan bahkan pembebasan. (Andrew Heywood, 2016)

Uraian pengertian politik identitas diatas, dapat digambarkan bahwa politik identitas adalah sebuah alat politik kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau

sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Jadi, politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. (Sri Astuti Buchari 2014)

D. Gerakan Politik Ormas Front Pembela Islam (FPI)

Keberadaan FPI di Jakarta memiliki nilai lebih dalam Pilkada 2017, apalagi secara prinsip mereka berbeda pandangan dengan partai-partai politik pendukung. Sikap politik FPI diawali dengan banyaknya kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat asli Jakarta yang islami. Sehingga FPI kerap kali menyuarakan sikap politiknya tapi pemerintah DKI Jakarta menyudutkannya bukan mendengarkannya. Hal inilah yang kemudian meruncingkan permusuhan antara Gubernur DKI Jakarta dengan FPI. Kekecewaan FPI disikapi dengan mengadakan pertemuan internal FPI dan antar ormas lainnya, kemudian mereka berkonsolidasi membicarakan kemaslahatan Jakarta, agar kehidupan di Jakarta sesuai dengan prinsip-prinsip mereka yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Walaupun tidak semua ormas menentang kepemimpinan Gubernur Basuki-Djarot, namun FPI tidak pernah mengenal lelah dan takut dalam memperjuangkan aspirasinya.

Setelah Basuki Cahya Purnama dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 pada hari Rabu 19 November 2014 di Istana Negara. FPI menolak dengan melakukan demonstrasi, yang berujung ditangkapnya 18 anggotanya. Penolakan FPI terhadap Basuki-Djarot tidak berarti apa-apa, bahkan FPI mendapat cibiran dari berbagai elemen masyarakat bukan hanya di Jakarta tetapi dari berbagai penjuru Indonesia.

Cibiran masyarakat dan beberapa ormas, justru melanjutkan penolakan FPI dengan penunjukan dan pelantikan gubernur tandingan versi FPI, yaitu Fachrurozi Ishaq yang merupakan Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) didaulat sebagai Gubernur Jakarta setelah FPI melakukan Musyawarah Masyarakat Jakarta pada Rabu 19 November 2014. "Kami dari presidium penyelamat Jakarta baru menetapkan Fachrurozi sebagai gubernur tandingan. Kami lebih memilih dipimpin oleh putra asli Betawi yang keturunan langsung dari Si Pitung," (merdeka.com, Senin 1 Desember 2014).

Pernyataan orator dalam Forum Musyawarah Masyarakat Jakarta diatas, menggambarkan betapa tingginya penolakan FPI terhadap pemerintahan Basuki-Djarot. FPI tidak lagi mengakui gubernur yang dilantik secara sah, mereka justru melantik gubernur sendiri. Sikap ini jelas tidak konstitusional dan menambah tidak simpatiknya masyarakat kepada FPI yang selama ini dikenal sebagai ormas radikal. Bahkan tidak sedikit masyarakat secara terang-terangan merendahkan FPI. Sikap yang ditampilkan FPI dapat dipahami bahwa penolakannya terhadap Ahok semata-mata didasari dari perbedaan agama/keyakinan. FPI menganggap bahwa pemimpin non-muslim tidak layak memimpin Jakarta, yang penduduk aslinya suku Betawi dan dikenal dengan identitas keislaman yang kuat.

Namun sikap berlebihan yang ditampilkan oleh Basuki sebagai pemimpin Jakarta pada saat itu, atas penolakan FPI terhadapnya justru menjadi senjata berbalik. Basuki dengan pernyataan keras setelah dilantik di Istana Negara mengatakan: "Surat saya ke Kapolri dan Kemendagri sudah jelas untuk meminta FPI dibubarkan supaya Jakarta tidak ada lagilah ormas anarkis untuk menakuti-nakuti orang dan buat macet." (Basuki Cahya Purnama, Rabu 19 November 2014)

Ekprisi dari ungkapan Basuki diatas seakan-akan beliau menunjukkan kekuatannya dan memberitahu bahwa pemerintah pusat ada di belakang beliau. Sifat heroik Basuki pada saat itu dinilai oleh masyarakat, mencerminkan arogansinya sebagai pemimpin Jakarta. Padahal pendirian dan pembubaran ormas

sudah diatur dalam undang-undang, bukan atas dasar keinginan atau usulan seorang gubernur yang menjadi anak emas pemerintah pusat. Isi dari dari surat itu menambah keruh hubungan FPI dengan Basuki Cahya Purnama. FPI semakin bersemangat untuk menumbangkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Tentunya dengan memainkan senjata pusaknya, yaitu isu agama.

Mulai saat itu FPI dinilai sebagai ormas yang paling dianaktirikan di Indonesia, pernyataan-pernyataan pembantu pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta yang diiyahkan oleh para pendukungnya di medsos sangat memojokan FPI, dan seakan-akan FPI menjadi *common enemy* bangsa Indonesia dengan banyaknya *bully*. Di luar dugaan, sikap terkait dengan pembubaran FPI justru menjadi pil kuat sekaligus senjata makan tuan bagi Basuki dan pendukung-pendukungnya. FPI terus bergeriliya tidak memandang apapun kecuali menolak dan menumbangkan Basuki sebagai gubernur Jakarta yang didukung oleh pemerintah pusat. Identitas keagamaan yang disuarakan FPI lambat laun mendapat simpati masyarakat Jakarta yang notabnya sangat religius. Kesempatan dan momen apapun digunakan oleh FPI untuk untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang religus bagi Jakarta. Silaturahmi politik yang dilakukan oleh FPI yang tidak berpiliasi kepada salah satu partai politik mulai membuahkan hasil. FPI mulai berkumonikasi dengan ormas-ormas sejenis yang sejalan dan membuka pula komunikasi dengan partai-partai politik yang bukan pendukung Basuki Cahya Purnama untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur yang dinilai regius dan mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan budaya masyarakat DKI Jakarta.

Puncak perjuangan FPI menarik sempatik masyarakat Jakarta adalah ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama, melakukan blunder politik dalam pidatonya di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta utara yang mengatakan :

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu,” (Basuki Cahya Purnama, 27 September 2017).

Ungkapan Basuki diatas sangat tendensius karena dinilai tidak sesuai dengan kapasitas kunjungan kerja yang dilakukan saat itu. Tragedi surat Al Maidah ayat 51 ini, segera ditangkap oleh FPI yang dipimpin langsung oleh Imam Besar mereka Habib Rizieq Shihab untuk membangkitkan keterikatan umat Islam terhadap kitab sucinya yang dianggap dinistakan. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran umat Islam di Jakarta pada tanggal 2 September 2017 yang mempunyai satu tujuan, yaitu menuntut diadilinya Basuki Cahya Purnama sebagai penista kitab suci mereka.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa FPI menjadi motor penggerak masyarakat dalam penuntutan diadilinya Basuki Cahya Purnama. Pristiwa ini menjadi penilaian besar masyarakat kepada FPI. Tidak ada ormas dan tokoh yang selantang dan seberani tokoh FPI dalam menyuarakan penuntutan itu, walaupun ada semuanya berada dibawah bayang-bayang FPI. Konsistensi FPI memperjuangkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di Indonesia tergambar dalam peristiwa demonstrasi penuntutan pengadilan penista agama. Bahkan peristiwa itu memunculkan ada beberapa pihak yang menyebut pimpinan FPI sebagai Imam Besar Umat Islam Indonesia.

Imam Besar FPI Rizieq Shihab, berhasil mengkonsolidasikan para ulama, habaib dan para tokoh yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah, mereka membuka sebuah acara bertajuk "Konvensi Calon Gubernur Muslim" pada hari Kamis 25 Februari 2016 di Kompleks Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan. Konvensi ini, dimulai pada 26 Februari hingga 10 Maret 2016 (kompas.com 26 Februari 2016). Tujuan konvensi diadakan adalah untuk menghadapi para calon

gubernur beserta wakilnya yang akan berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, khususnya untuk menghadang Basuki Tjahaja Purnama. Konvensi untuk menjaring bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diselenggarakan para tokoh berbasis agama ini sungguh menjadi fenomena baru yang menarik perhatian umat Islam Jakarta khususnya. Kegiatan yang biasa menjadi rutinitas partai politik menjelang Pilkada tapi kali ini dikerjakan oleh ormas dan mendapat respon positif dari masyarakat Islam Jakarta.

Terlepas tujuannya menjegal Basuki dengan semangat "sektarian" yang pekat sebagaimana disebutkan Ketua Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah Habib Rizieq Syihab. "Konvensi Gubernur Muslim dimaksudkan untuk mengikhtiarkan sepasang calon gubernur dan wakil gubernur Muslim untuk berlaga *head to head* melawan Ahok," Upaya Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah ini, sekaligus menjadi peringatan bagi pemilih yang punya hak pilih dalam menentukan pilihannya yang sesuai harapan majelis tersebut. Adapun 11 syarat peserta konvensi adalah sebagai berikut: laki-laki, beragama Islam, berakal, sehat jasmani dan rohani, alim, visioner, berpihak kepada kaum lemah, memiliki rekam jejak tak pernah mencela dan memusuhi Islam dan umatnya, bersedia menerima program yang ditawarkan Majelis Tinggi atau Dewan Pemilih, serta siap mendukung dan menjadi juru kampanye calon lain yang terpilih. Konvensi ini sangat menegaskan betapa FPI sangat memperjuangkan identitas keislaman untuk pemimpin DKI Jakarta.

E. Ikatan Emosional Masyarakat Islam Jakarta

Jumlah penduduk muslim di Ibukota mencapai 8.339.988 atau sebesar 83 persen dari total populasi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2016). Sedangkan profil demografi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Indikator menunjukkan ada 85 persen pemilih umat Islam. Persentase yang menunjukkan besarnya pemilih dari

kalangan umat Islam, sebelum diselenggarakannya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak dianggap suatu yang krusial, karena para pengamat dan politisi sering sekali menilai bahwa Jakarta sebagai daerah yang diisi oleh pemilih-pemilih rasional.

Penilaian diatas, melahirkan anggapan bahwa memilih petahana rasional dan memilih selain petahana tidak rasional, juga menampilkan kesombongan partai-partai pendukung penguasa yang berapologi bahwa segala apa yang sudah dilakukan olehnya itulah yang paling benar. Tanpa disadari pernyataan-pernyataan pendukung petahana yang bermuatan politik itu melahirkan perasaan alergi masyarakat Jakarta untuk memberikan suara kepada calon yang mereka usung. (14 Februari, 2017)

Sebelum dan sesudah tragedi surat Al-Maidah ayat 51 menjadi bukti betapa kuatnya ikatan keislaman warga Jakarta, warga Islam Jakarta sudah kecewa dan resah dengan kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dikeluarkan oleh Basuki Cahya Purnama, diantaranya adalah:

- a. Melarang pemotongan hewan qurban di sekolah-sekolah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan.
- b. Pembatasan lokasi unjuk rasa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
- c. Desember 2013, Ahok pernah mengeluarkan wacana untuk menghilangkan kata 'agama' di KTP.
- d. Relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur tahun 2015
- e. Penghapusan aturan pengenaaan seragam Muslim di sekolah dasar dan menengah setiap Jumat. Berdasarkan surat edaran nomor 48/SE/2014 yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, pada 14 Juli lalu.

- f. Desember 2013, Ahok pernah mengeluarkan wacana untuk melegalkan prostitusi (legalisasi prostitusi).
- g. Gaya bicara Ahok yang ceplas-ceplos
- h. Wacana pemberhentian dana hibah ke Bamus Betawi
- i. Kriminalisasi atas Habib Rizieq Shihab dan diperiksanya beberapa tokoh yang selama ini getol berjuang melalui GNPF.
- j. Toleransi NU dan Muhammadiyah terhadap Ahok dan partai pendukungnya membuat warga Islam Jakarta semakin kuat memunculkan keislaman dalam Pilkada DKI .
- k. Pelecehan terhadap K.H. Ma'ruf Amin, dan soal komunikasi telepon mantan Presiden SBY memancing kemarahan tokoh, Ormas dan warga NU, sebagai akibat dipermalukannya K.H.Ma'ruf Amin.

Ikatan keislaman warga Jakarta semakin kuat ketika fenomena langka terjadi menjelang akhir tahun 2016, yaitu, serangkaian aksi bela Islam yang dimotori oleh pimpinan FPI Rizieq Shihab dan berhasil menyatukan mayoritas umat Islam Jakarta. Semangat persatuan itu diperkuat dengan banyak tokoh-tokoh muslim yang hadir dalam aksi itu, seperti Abdullah Gymnastiar (“Aa Gym”) pimpinan Pesantren Daarut Tauhid Bandung, Muhammad Arifin Ilham pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Habieb Rizieq Shihah Imam Besar FPI, Bachtiar Nasir Ketua GNPF yang juga Sekretaris Jenderal I Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Kyai Ma’ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh dari ormas Islam lainnya yang memiliki banyak jamaah mampu duduk bersama-sama dalam aksi itu, untuk mengusung isu bersama terkait penistaan agama. (Ahmad Sholihin, 2018)

Kumpulan aksi ini, secara otomatis meningkatkan hubungan emosional mereka sebagai sesama muslim. Dan tanpa diperintah dan dimobilisasi oleh partai politik, mereka menjelma menjadi tim sukses dua pasangan calon penantang

petahana. Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pendiri NSEAS (*Network for South East Asian Studies*), Muchtar Effendy, beliau mengatakan: "Ormas-ormas merupakan kelompok aksi di tengah-tengah rakyat pemilih, mempromosikan dan mengkampanyekan Paslon Anies-Sandi, mereka memosisikan diri sebagai relawan untuk pasangan Anies-Sandi dan menentukan kemenangan (Republika, Sabtu 4 Maret 2018).

Gerakan politik identitas FPI menyatu dengan warga Jakarta. Slogan "pilih pemimpin muslim yang santun" tidak dapat terbendung, menyuarakan di segala penjuru Jakarta. Penggunaan politik identitas keislaman semakin menguat seiring dengan menguatnya emosional warga Jakarta. Berbagai kesempatan slogan terkait pemimpin muslim disampaikan baik di masjid, majlis ta'lim, paguyuban-paguyuban, ceramah agama, khutbah jum'at semuanya dijadikan media untuk menumbangkan petahana yang dianggap tidak layak menjadi pemimpin Jakarta karena ucapan-ucapannya yang tidak dapat dikendalikan.

F. Blunder Sikap Politik dan Kebijakan Pemerintah Pusat

Ramainya Pilkada Jakarta bukan karena adanya kandidat non-muslim yang maju sebagai kepala daerah. Ada banyak kandidat non-muslim di luar Jakarta yang ikut bertarung dalam Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, tetapi tidak seheboh Jakarta. Pilkada Jakarta juga bukan karena adanya seorang keturunan Tionghoa yang ikut menjadi kontestan dalam bursa pemilihan kepala daerah karena ada sejumlah daerah, seperti Singkawang di Kalimantan Barat, ada kandidat Tionghoa juga ikut berlaga. Hiruk pikuk Pilkada Jakarta menjadi ramai sesungguhnya karena ada sekelompok elit politik, tokoh agama, dan pedagang besar yang bernafsu menguasai Jakarta dengan beragam motif dan kepentingan tentunya (Sumarno Qurtubi 13-04-2017 Manipulasi Agama dalam Pilkada).

Kelompok politik ingin mengontrol jalannya roda pemerintahan sesuai dengan selera mereka. Kaum pebisnis tentu saja ingin dagangan mereka lancar tidak ada yang menghambat jalannya perbisnisan. Sementara sekelompok elit agama, terutama elit muslim ibukota, ingin Jakarta menjadi kota yang menerapkan norma-norma atau standar-standar keagamaan/keislaman sesuai yang mereka imajinasikan. Perselingkuhan penguasa dan pengusaha inilah yang dilihat masyarakat pada Pilkada Jakarta 2017. Sehingga warga Jakarta merasa dipinggirkan, kepentingan mereka dikorbankan demi kepentingan penguasa dan pengusaha.

Keresahan warga Jakarta pada akhirnya direspon dengan hadirnya Presiden Jokowi di Monas pada aksi damai 212. Hal ini menandakan kenegarawanan Presiden dan sikap netralitas pemerintah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, beberapa sikap pemerintahan Joko Widodo di bawah ini menimbulkan reaksi negatif dari warga Jakarta:

- a. Kemesraan Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya meninjau proyek *light rail transit dan mass rapid transit* semakin mempertegas isu miring yang beredar selama ini.
- b. Penunjukan keakraban Jokowi-Ahok saat meninjau pembangunan proyek LRT di Kilometer 13 Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016),
- c. Pembicaraan empat mata dengan Jokowi-Ahok tanpa didamdingi pejabat lain yang semulanya ada.
- d. Argumen kebhinekaan yang selama ini dipakai untuk membela Ahok, berujung konflik sosial yang parah bila kekuasaan masih melindunginya. (WSP/m49/C)
- e. Reklamasi Teluk Jakarta
- f. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras

g. Penunjukan Keakraban Jokowi-Ahok saat meninjau proyek MRT di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Sikap Presiden Joko Widodo diatas, memberikan penilaian bahwa beliau tidak netral dan itulah yang tersimpan dalam memori sebagian warga Jakarta. Banyaknya demonstrasi masyarakat kepada Basuki Cahya Purnama atas kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kultur masyarakat Jakarta tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak mendukung calon Petahana. Walaupun asumsi dukungan presiden kepada calon petahan dibantah dan presiden mengatakan bahwa beliau sebagai kepala negara selalu menjaga netralitas dalam Pilkada dimanapun. Masyarakat tetap tidak percaya dengan argument apapun. Fakta ini diiyahkan dengan sebuah pernyataan "Sudah bukan rahasia lagi bahwa Jokowi di belakang Ahok, sehingga kasus-kasus yang jelas-jelas merugikan negara hingga kini belum ditindaklanjuti." (Fadli Zon, Jumat 30 Oktober 2016)

G. Kesimpulan

Pembahasan kajian ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gerakan politik identitas yang dikomandoli oleh FPI, berawal dari permusuhan pribadi antara FPI dengan Basuki Cahya Purnama yang dalam Pilkada Jakarta 2017 menjadi calon gubernur petahana. Kemudian gerakan politik identitas FPI ini terus menguat sangat emosional akibat dari pernyataan-pernyataan arogan Basuki. Sehingga pada puncaknya peristiwa Surat Al-Maidah ayat 51 menjadi senjata pusaka FPI untuk terus menyuarakan perlawanan untuk menumbangkan Basuki. Sehingga FPI melalui Imamnya Habib Rizieq Shihab, mampu mengumpulkan lautan manusia di Jakarta untuk menuntuk Basuki sebagai penista agama. Aksi inilah yang terus membentuk dan menguatkan hubungan keislaman warga Jakarta. Dan juga sikap pemerintah pusat yang selalu menganakemaskan Basuki, menjadi vitamin sebagai penguat perasaan warga Jakarta yang pada saat

itu merasa terdjolimi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Basuki secara sepihak atas nama Pemerintah DKI Jakarta.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Assyari. Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad alternative. Edisi Desember 2017, Vol. 41, No. 2, ISSN 240-1706.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Habibi, Muhammad. Analisis Politik Identitas. JurnalVolume...2017
- Heller, Agnes dan Punsher, Sonja. 1995. Biopolitical Ideologies an their Impact on the New Social Movements. *A New Handbook of Political Societies*. Oxford, Blackwell.
- Heywood, Andrew. 2016, Ideologi Politik Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harrison, Lisa. 2016. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: PT Karisma Utama
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project.
- Putra, Fadhillah dkk. 2006. *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*. Malang: PlaCID's dan Averroes Press
- Sumanto, Al Qurtuby. 2016. Agama, Politik, dan Politik Agama. <http://www.dw.com>. diakses pada 11 Maret 2016.

Sholihin, Ahmad. Gerakan Politik Islam Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I,II dan III. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 10, No. 1, 2018 (12-33) ISSN 2085-143X

Zusron Alfaqi, Mifdal. 2015. Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2. 2015

<https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html>

<https://www.merdeka.com/jakarta/fpi-lantik-gubernur-tandingan-di-depan-gedung-dprd-dki.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/perseteraan-panjang-ahok-vs-fpi.html>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/26/09180791/Habib.Rizieq.Jarimg.Bakal.Cagub.DKI.untuk.Lawan.Ahok>